

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
(SHU) PADA KOPERASI MINA BAHARI
(Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura,
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Elma Fajar Wati

NPM : 1521030200

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN SISA HASIL (SHU)

USAHA PADA KOPERASI MINA BAHARI

(Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura,

Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

dalam Ilmu Syariah

Oleh :

Elma Fajar Wati

NPM : 1521030200

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Dr.H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/ 2019 M

ABSTRAK

Menurut undang-undang No. 25 Tahun 1992, Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Keraguan-raguan masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim khususnya masyarakat menengah kebawah, sebagai calon pengguna koperasi terbanyak yang tidak mau terjebak kedalam praktik riba terhadap munculnya produk-produk koperasi. Apakah ini termasuk dalam riba atau bukan, karena Sisa Hasil Usaha tersebut berasal dari keuntungan penjualan produk dan jasa dari utang piutang. Tetapi disisi lain koperasi milik bersama dan dinikmati bersama bahkan setiap anggotanya merasa tidak dirugikan sama sekali dalam hal ini.

Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan di koperasi Mina Bahari, Kecamatan teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran ? dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian Sisa Hasil Usaha pada koperasi tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembagian Sisa Hasil Usaha pada koperasi Mina Bahari Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui tujuan hukum Islam terkait dengan pembagian Sisa Hasil Usaha pada koperasi tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di koperasi Mina Bahari Kecamatan teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang akan menjelaskan mengenai praktik pembagian Sisa Hasil Usaha di koperasi Mina Bahari. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi Mina Bahari berdasarkan praktik bagi hasil telah sesuai dengan akad *syirkah al-inan*, dikarenakan dari penanaman modal, pekerjaan, keuntungan, kerugian dan persentase dari transaksi masing-masing anggota pada penjualan produk koperasi tidak sama. Akan tetapi, pada penjualan produk usaha lain yaitu produk simpan (Simpan pinjam) pada koperasi Mina Bahari masih menggunakan jasa 1% pada setiap pembayarannya, mengenai hal ini adanya perbedaan pendapat para ulama ada yang mengatakan bunga dan ada yang mengatakan bukan bunga. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada anggota-anggota koperasi yang menggunakan jasa pinjam, anggota tidak merasa diberatkan bahkan anggota merasa tertolong. Dalam hal ini penulis memilih jasa pinjam 1% bukan termasuk bunga dikarenakan jasa tersebut sudah disepakati semua anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mina Bahari (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)

Nama : Elma Fajar Wati

NPM : 1521030200

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197012282000031002

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

NIP. 196806241997031003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.SI.

NIP: 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) PADA
KOPERASI MINA BAHARI (Studi Pada Koperasi Pegawai
Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura Kecamatan
Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)** disusun oleh : **Elma
Fajar Wati, NPM : 1521030200, Jurusan : Muamalah,** telah
diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada
hari/tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Jayusman, S.Ag., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Evi Febriani, M.Pd.I. (.....)

Penguji Utama : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji Pendamping II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. (.....)

**Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



M. H. Chairuddin, M.H.
6210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu beriman.”*

(Q.S. Al-Baqarah: 278)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT karena telah memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta dan sayang serta rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Endang Gunawan dan Ibu Siti Mut'atun yang mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta, kasih sayang dan kesabaran, senantiasa mendoakan dengan ikhlas, memberikan semangat serta dukungan untukku.
2. Adik kandungku, Hafidz Ilham Gunawan yang selalu mendoakan ku selama ini.
3. Untuk almamaterku tercinta Uin Raden Intan Lampung, terimakasih telah membawaku pada tahap ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Elma Fajar Wati, anak pertama dari pasangan Bapak Endang Gunawan dan Ibu Siti Mut'atun. Lahir di Lampung Tengah pada tanggal 19 Agustus 1997. Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. Taman Kanak-kanak Gula Putih Mataram pada tahun 2002.
2. Sekolah Dasar Swasta 01 Gula Putih Mataram pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009.
3. Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Mathalaul Huda, Ambarawa, Pringsewu pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012.
4. Madrasah Aliyah Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Mathalaul Huda, Ambarawa, Pringsewu pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
5. Dan melanjutkan study S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mina Bahari” dapat diselesaikan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dari para pengikut hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah pada program studi Muamalah Fakultas SyARIAH dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, diucapkan terimakasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci ucapan terimakasih diucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan tanggapan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah.
4. Dr. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag. dan Badruzzaman, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Para staff karyawan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung

7. Pimpinan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
8. Teman-teman seperjuanganku yaitu seluruh mahasiswa dan mahasiswi Muamalah angkatan 2015 khususnya kelas A.
9. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini yang telah dibalas Allah Swt dengan kebaikan yang berlipat ganda. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 02 September 2019

Elma Fajar Wati
152103020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Fokus Penelitian	13
H. Signifikasi Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	15
1. Koperasi.....	15
a. Pengertian Koperasi	15
b. Sejarah Perkembangan Koperasi	21
c. Jenis-Jenis Koperasi.....	23
d. Azaz-Azaz Koperasi	25
2. RIBA	
a. Pengertian Riba.....	25
b. Macam-Macam Riba.....	31
c. Dasar Hukum Riba.....	37
d. Alasan Diharamkannya Riba	42
e. Pendapat Ulama Tentang Riba.....	43
f. Praktik Riba di Zaman Sekarang	50

3. FATWA DSN-MUI Tentang Koperasi dan Riba	53
B. Tinjauan Pustaka	61

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.....	64
1. Sejarah Terbentuknya Koperasi Mina Bahari.....	64
2. Visi Dan Misi Koperasi Mina Bahari	65
3. Struktur Organisasi Koperasi Mina Bahari.....	66
B. Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Mina Bahari	73

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Mina Bahari	78
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mina Bahari	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	93
--------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Mina Bahari”. (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran). Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap judul ini, maka penulis memandang perlu menyajikan penjelasan judul mengenai kata-kata yang membentuk judul tersebut sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam untuk ditaati dan diikuti demi menjaga kepentingan manusia.² Hukum yang sebenarnya tidak lain dari Fiqih Islam atau Syariat Islam, yaitu “suatu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.³
3. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 42.

³ Hasbie Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998), h. 44.

dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.⁴

4. Koperasi Mina Bahari adalah suatu organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama yang berlandaskan kegiatan dengan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.⁵

5. Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah koperasi yang berdiridibawah naungan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung yang berada di Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.⁶

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan judul ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Mina Bahari. (Studi ini di lakukan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran).

⁴Pasal 45 ayat (2) UU no 25 tahun 1992 Tentang SHU.

⁵Refrison Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta : BPFE, 2000), h. 1

⁶Profil Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Mengingat Koperasi adalah lembaga keuangan yang sangat diminati oleh masyarakat namun, di koperasi terdapat Sisa Hasil Usaha yang dianggap sebagian orang adalah riba. Padahal dalam koperasi Sisa Hasil Usaha merupakan bagi hasil yang berasal dari anggota dan untuk anggotanya sendiri, dari itu perlu diketahui tentang masalah tersebut dalam Hukum Ekonomi Syariah.

b. Alasan Subjektif

Judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang diambil serta dipelajari dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dalam Islam sangatlah penting karena ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang membawa pada kesejahteraan umat. Pendapat dari Ismail al-Furuki yang dikutip oleh Ahmad Dimiyati menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi umat dan kemakmuran adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh umat Islam.⁷

Koperasi merupakan organisasi yang terbuka, terutama bagi para anggotanya. Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditunukan pada pengutan dan basis bisnis, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya memiliki jiwa kewirausahaan dan

⁷Ahmad Dimiyati, *Islam dan Koperasi* (Jakarta: KOPINFO, 1998), h. 48.

profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif dan mandiri.

Koperasi saat ini menjadi wadah organisasi yang sangat diminati masyarakat karena dengan adanya koperasi sangat membantu masyarakat dalam upaya memperoleh permodalan untuk usaha. Masyarakat menyadari akan adanya pihak yang menawarkan untuk usaha yang lebih besar seperti bank misalnya, namun masyarakat berfikir bahwa bank memiliki bunga yang cukup besar sehingga lebih memilih koperasi.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab ayat 1 tahun 1992 yang menyatakan : Koperasi adalah usaha yang beranggotakan orang-orang atas badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Koperasi pada setiap setahun sekali membagikan Sisa Hasil Usaha. Sebagai salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari perolehan SHU yang baik setiap tahunnya. Sisa Hasil Usaha ini diatur dalam BAB IX Pasal 45 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang berbunyi :

⁸ Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor .25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

1. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.⁹

Salah satu koperasi yang ingin penulis teliti adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari yang terletak di jalan Yos Sudarso, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Awal mula adanya koperasi tersebut yaitu sejak didirikannya Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Provinsi Lampung dan dirasa perlu mendirikan suatu badan usaha bersama yang dimana koperasi tersebut hanya diperuntukan kepada pegawai yang bekerja di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut saja. Tujuan dari koperasi Mina Bahari tersebut adalah untuk menciptakan kebersamaan dan mencapai kesejahteraan bersama.

Pembagian Sisa Hasil Usaha ini dilakukan setiap tahunnya secara rutin. Sisa Hasil Usaha ini diperoleh oleh masing-masing anggota berdasarkan banyaknya transaksi pada setiap unit usaha yang dimiliki

⁹*Ibid.*

koperasi Mina Bahari. Usaha yang dijalankan koperasi tersebut terdiri dari usaha waserda, usaha simpan pinjam, usaha perlengkapan perikanan, dan usaha lainnya.

Dalam Islam percampuran harta antara satu pihak dengan pihak lainnya itu sama dengan istilah *syirkah*, dimana adanya penyertaan modal, baik berupa uang atau barang, adanya kesepakatan kerja antara kedua belah pihak dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian dibagi sesuai dengan modal yang diberikan kedalam usaha tersebut.

Masalah yang dihadapi adalaah keraguan-raguan masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim khususnya masyarakat menengah kebawah, sebagai calon pengguna koperasi terbanyak yang tidak mau terjebak kedalam praktik riba terhadap munculnya produk-produk koperasi, yaitu salah satunya adalah unit usaha simpan pinjam. Apakah ini termasuk dalam riba atau bukan, karena Sisa Hasil Usaha tersebut berasal dari utang piutang yang ditarik keuntungannya. Tetapi disisi lain koperasi milik bersama dan dinikmati bersama bahkan setiap anggotanya merasa tidak dirugikan sama sekali dalam hal ini. Sebagaimana dalam firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya :*“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”* (Q.S. al-Maidah : 2)¹⁰

Dasar hukum tentang larangan riba ini adalah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qu'ran surah Al-Imran ayat 130, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”*.¹¹

Bahkan segala bentuk riba dan hal-hal yang berkaitan dengannya sangat dicela dalam islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ¹²

Artinya: *“Dari Jabir dia berkata “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “ Mereka semua itu adalah sama.”* (HR. Muslim).

¹⁰Andi Subarkah, et. al. *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung : Syamil Quran, 2012), h. 106.

¹¹Andi Subarkah, et. al. *Al-Quran dan Terjemah...*, h. 66.

¹²Razak A, Latief Rais, *Terjemah Hadist Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), h . 266.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang hukum Sisa Hasil Usaha tersebut yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada koperasi Mina Bahari”. (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimanakah sistem pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan proposal ini di antaranya :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan di Koperasi Mina Bahari, Desa Hnura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terkait dengan pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah:

a. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan terkait praktik pembagian Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Mina Bahari, sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa Syari'ah.

b. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik pembagian Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Mina Bahari, dan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Kemudian untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Yang digunakan adalah metode kualitatif dimana yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan adalah metode survei yaitu mendapatkan data dari tempat tertentu, penelitian ini melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mendengarkan wawancara terstruktur dan sebagiannya.¹³ Dalam hal ini penulis melakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis kualitatif yaitu suatu metode pendekatan dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung : CV Alfabeta, 2009), h. 6.

Maksud dari analitis sendiri yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.¹⁴ Dalam penelitian data diambil dan disusun dari apa yang telah diperoleh di Koperasi .

2. Data dan Sumber Data

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum islam terhadap praktik pembagian sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data premier diperoleh langsung oleh peneliti, dengan wawancara langsung. Data ini merupakan data asli, yang baru pertama kali diperoleh. Data ini sangat bermanfaat bagi penelitian yang sedang dilakukan dan juga untuk penelitian dimasa depan sebagai data sekunder.¹⁵

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer diperoleh daridokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁶

¹⁴Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), h. 68.

¹⁵Timotius Kris H, *Pengantar metodologi penelitian...*, h. 69.

¹⁶*Ibid.*

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, transkrip dan lain sebagainya.¹⁷

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota koperasi Mina Bahari Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran yang berjumlah 123 anggota.

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dari cara-cara tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.¹⁸

¹⁷Ibid, h.107.

¹⁸Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), H. 104.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai / relevan dengan masalah penelitian.

b. Tahapan Sistematika Data

Tahapan Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

6. Metode Analisa Data

Analisa data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun menggunakan sistem data yang Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Kabupaten Pesawaran diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, penulis menganalisis data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Analisa data menggunakan cara berfikir deduktif, yakni menganalisa data dari

norma-norma atau dasar-dasar hukum islam untuk menilai pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan pada Koperasi dan disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah penerapan yang dilakukan tersebut sesuai dengan hukum Islam yang ada.

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Disamping itu juga fokus penelitian merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.¹⁹

Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah membahas praktik pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi Mina Bahari Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

H. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikasi akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikasi Peneletian

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman tinjauan yang terkait dengan masalah mengenai pembagian sisa hasil usaha (SHU).

¹⁹*Ibid*, h. 108.

2. Signifikasi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia untuk lebih rinci mengenai pembagian sisa hasil usaha.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Koperasi

a. Pengertian koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* (*co* berarti bersama dan *operation* berarti usaha). Koperasi berarti usaha bersama, misalnya koperasi unit desa (KUD) artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa, dana koperasi karyawan artinya usaha bersama para karyawan. Ada pula yang menyatakan koperasi berasal dari bahasa latin *cum* (yang iartinya dengan) dan *operatio* (yang artinya bekerja). Dari dua kata tersebut, maka koperasi dapat diartikan bekerja dengan orang-orang lain. iKoperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.²⁰

Menurut International Labour Organization PBB, koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan modal,

²⁰Baswir Refrisond, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta : BPFE.2000), h. 1.

dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai.²¹

Menurut Arifin Chaniago koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan pada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.²²

Mohammad Hatta, yang dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Gerakan koperasi adalah lambang harapan bagi kaum ekonomi lemah berdasarkan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa percaya diri dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat diri sendiri.²³

Margono Djojohadikusumo dalam bukunya yang berjudul 10 tahun koperasi mengatakan bahwa koperasi ialah perkumpulan seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.²⁴

²¹Idri, *Hadist Ekonomi:Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h 246.

²²Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori dan Praktik* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2001), h. 4.

²³*Ibid.* h. 17.

²⁴Firdaus Muhammad, Edi Susanto Agus, *Perkoperasian : Sejarah, Teeori dan Prakrik* (Bogor : Ghlia Indonesia, 2004), h. 39.

Koperasi menurut Mahmud Syaltut²⁵, koperasi adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh Fuqaha terdahulu yang membagi syirkah menjadi 4 macam :

- a. *Syirkah abdan*, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya antar mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya, *syirkah abdan* menurut Abu Hanifah dan malik boleh, sedangkan Imam Asyafi'i melarangnya.
- b. *Syirkah muwafadhah*, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama *syirkah*. *Syirkah muwafadhah* boleh menurut Abu Hanifah dan lainnya tidak.
- c. *Syirkah wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Imam Hanafiyah dan Hanbali membolehkan *syirkah wujuh* ini, sedangkan Imam Syafi'i melarang sebab *syirkah* hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.
- d. *Syirkah 'inan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.292.

masing-masing. *Syirkah 'inan* disepakati kebolehan nya oleh para ulama.

Bedasarkan uraian di atas, kiranya dapat dipahami bahwa koperasi menurut Mahmud Syaltut adalah suatu kerja sama baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah dan sebagainya.

Menurut Majfuk Zuhdi yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.²⁶

Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 3 tentang Pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam undang-undang No. 25/1992 Pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi adalah badan yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya dengan berdasarkan

²⁶Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : CV.Haji Masagung, 1988) h. 148.

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²⁷

Koperasi, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian adalah sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para aggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.²⁸

Sumber modal pada koperasi berasal dari simpanan pokok anggota yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota koperasi, yang besarnya untuk setiap masing-masing anggota adalah sama. Selanjutnya ada simpanan wajib yaitu sejumlah simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota pada waktu tertentu yang telah disepakati. Kemudian ada dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan.²⁹

Sisa Hasil Usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan

²⁷Taringan Akmal, *Dasar-Dasar Koperasi* (Bandung : Cita Pustaka Media, 2006) h. 212.

²⁸Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

²⁹Widiyanti Ninik, Y.W, Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cet.4(Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 132.

usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat.

Setiap anggota memberikan dorongan aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari pada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi inilah yang dimaksud dengan jasa usaha.³⁰

Menurut Pasal 34 Ayat 1 UU No. 12/67 dinyatakan “Sisa Hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh didalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan”. Sesuai dengan salah satu sendi-sendi dasar koperasi, yang mengatakan bahwa “pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota”. Maka pembagian Sisa Hasil Usaha dibedakan antara berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota”.³¹

Bedasarkan pengertian di atas, bahwa yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerja sama, gotong royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Kerja sama dan gotong royong ini sekurang-kurangnya dilihat dari dua segi, yaitu pertama, modal awal koperasi dikumpulkan dari semua anggotanya.

³⁰Arifin Sitio, Tamba Halomoan, *Koperasi : Teori dan Praktik...*, h. 28.

³¹Widiyanti Ninik, Y.W, Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Cet.4...*, h.

Mengenai keanggotaan koperasi berlaku azas satu anggota dan satu cara. Karena itu, besarnya modal yang dimiliki anggota, tidak menyebabkan lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya. Kedua, permodalan itu sendiri bukan satu-satunya ukuran dalam pembagian sisa hasil usaha. Modal dalam koperasi diberi keuntungan terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha koperasi sebagian besar dibagikan kepada anggota dalam pemanfaatan anggota koperasi.³²

b. Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia

Koperasi di Indonesia tumbuh di Purwokerto tahun 1896. Seorang Pamong Praja bernama R. Aria Wiria Atjmaja mendirikan sebuah bank yang diberi nama Hulph-en Spaar Bank (Bank pertolongan dan simpanan). Bank itu didirikan untuk menolong para priyai/pegawai negeri yang terjerat hutang pada lintah darat. Bank itu meminjamkan kepada para pegawai negeri dengan bunga yang rendah dari dana yang dikumpulkan para pegawai itu sendiri. Usaha R. Aria Wiria Atjmaja kemudian dibantu dan diteruskan oleh Asisten Residen Belanda De Wolf van Westerorde yang telah mempelajari sistem koperasi di Jerman pada masa cutinya. Akan tetapi usaha De Wolf van Westerorde tidak banyak berhasil karena salah satu penyebabnya adalah adanya halangan dari pemerintah Belanda.

³²Ali Hasan M, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003), h. 107.

Pemerintah Belanda takut apabila organisasi koperasi diperalat untuk alat politik melawan penjajah dan kemampuan rakyat Indonesia dalam berorganisasi lewat koperasi dapat menjadi awal kemampuan berorganisasi politik. Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran pemerintah Belanda menjadi kenyataan. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang disusul oleh Sarekat Dagang Islam (kemudian menjadi Serikat Islam) membangkitkan semangat rakyat dan mendorong pembentukan koperasi rumah tangga (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan) dan koperasi konsumsi yang merupakan alat memperjuangkan secara mandiri peningkatan taraf hidup.³³

Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se-Jawa yang diadakan di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut, diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi, serta menganjurkan diadakannya pendidikan koperasi dikalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 140 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Kemudian pada tahun 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I di Surabaya untuk melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin dan Ekonomi terpimpin. Sejak saat itu, langkah-langkah mempolitikkan koperasi mulai

³³ Anoraga Pandji, *Dinamika Koperasi* (Jakarta : PT Rineka Cipta 2007), h. 40.

tampak. Pada tahun 1965 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 1965, dimana prinsip Nasional Koperasi diterapkan pada koperasi. Pada tahun itu juga dilaksanakan Musyawarah Nasional Koperasi II di Jakarta, yang merupakan pengambilalihan koperasi oleh kekuatan-kekuatan politik sebagai pelaksanaan UU. Pada tahun yang sama pula terjadi pemberontakan Gerakan Tiga Puluh September Yang Digerakkan Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI), yang berpengaruh besar terhadap perkembangan koperasi.

Kemudian pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tentang Pokok-Pokok perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya UU ini, semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban organisasi koperasi. Keharusan menyesuaikan diri dengan UU tersebut mengakibatkan penurunan jumlah koperasi, dari sebesar 64.000 unit tinggal menjadi 15.000 unit. Selebihnya tidak dapat menyesuaikan diri. Pada tahun 1992, uu No. 12 Tahun 1967 tersebut disempurnakan dan diganti menjadi UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Disamping UU No. 25 tersebut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Peraturan pemerintah tersebut juga sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam usaha jasa

keuangan, yang membedakan koperasi bergerak disektor moneter dan sektor riil.³⁴

c. Jenis-Jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Jenis-jenis koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama segi bidang usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya. Dari segi usahanya koperasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a) Koperasi yang berusaha tunggal, yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi.

b) Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai banyak bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.³⁵

Dari segi tujuannya koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi;

³⁴Arifin Sitio, Halomoan Tamba *Koperasi : Teori dan Praktik...*, h. 11.

³⁵Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah...*, h. 148.

- b) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya;³⁶
- c) Koperasi Jasa, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang jasa yang dibutuhkan dan diusahakan oleh anggotanya.³⁷

Dari segi jenjang kewilayahan dan keanggotannya koperasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a) Koperasi premier, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan sekelompok orang;
- b) Koperasi skunder, yaitu koperasi yang anggotanya meliputi kumpulan dari koperasi-koperasi yang sejenis.³⁸

d. Azaz Koperasi

Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan dan kegotoroyongan, azaz ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang juga menganut tata kehidupan yang berazaskan kekeluargaan dan kerjasama, saling bantu membantu. Azaz koperasi meliputi :

- a) Azaz kekeluargaan yang mencerminkan adanya kesadaran dan budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama;

³⁶Fuad Muhammad Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi* (Bandung : PT Alma'arif, 1985), h. 167.

³⁷Ahman Eeng dan Indriani Epi, *Membina Kompetensi Ekonomi* (Bandung :Grafindo Media Pratama. 2007), h. 120.

³⁸Deliarnov, *Ekonomi* (Jakarta : Erlangga. 2007), h. 34.

b) Azaz kegotong royongan, yang berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat kerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.³⁹

2. Riba

a. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *al-ziyadah* (tambahan) atau *al-nama* (tumbuh), yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Ini sebagaimana firman Allah SWT :


أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ أَرَبَى مِنْ أُمَّةٍ
Artinya : “Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain”. (Q.S. an-Nahl 16).

Adapun riba secara terminologi adalah tambahan sesuatu yang dikhususkan. Maksudnya adalah tambahan pada modal pokok⁴⁰. Allah SWT berfirman :

تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

Artinya : “ Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu.” (Q.S. al-Baqarah 279).

³⁹Anoraga Panjdhi dan Widiyanti Ninik, *Management Koperasi Teori dan Praktik* (Semarang : Pustaka Jaya. 1994), h. 18.

⁴⁰Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al. *Ensiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 madzhab edisi Keempat* (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif. 2017), h. 105-106.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum ada yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini, Allah mengingatkan dalam firman-Nya Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar)”.

Dalam pengertian *al-bathil* dalam dalam ayat tersebut, bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun, yang dimaksud riba dalam ayat Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan *syari'ah*. Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu, transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya.⁴¹

⁴¹Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat : GP Press Group, 2014), h. 55.

Dalam hal jual beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat. Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesepakatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.⁴²

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa saja rugi.⁴³

Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam pengertian lain, riba berarti tumbuh dan membesar adapun menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁴⁴

⁴²*Ibid*, h. 55.

⁴³*Ibid*, h. 56.

⁴⁴Idri, *Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam perspektif hadist nabi* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 181.

Secara istilah *syar'i*, menurut A. Hasan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam meminjam.⁴⁵

Pengertian riba secara tekhnis menurut para *Fuqaha* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. *Bathil* dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (*zalilam*) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara *bathil* akan menimbulkan kezaliman diantara para pelaku ekonomi.⁴⁶

Pengertian riba dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan, tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi dari si peminjam. Dalam Islam, riba secara khusus merujuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.⁴⁷

Syabirin Harahap menyatakan bahwa riba adalah kelebihan uang yang dipinjamkan.⁴⁸ Shaleh Ibnu Fauzan berpendapat bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Menurut jumhur ulama, prinsip utama dalam riba adalah penambahan, yaitu penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis.

⁴⁵Harahap Syabirin, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 46.

⁴⁶Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank Dalam Islam* (Jurnal Al-Adl Vol.7 No.2 Juli 2014), h. 69.

⁴⁷Nafik H.R Muhammad, *Benarkah Bunga Haram ?* (Surabaya : Amanah Pustaka. 2009), h. 94.

⁴⁸Harahap Syabirin, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam...*, h. 46.

Dalam fiqh muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut Wahid Abdus Salam Baly, riba adalah tambahan yang di isyaratkan terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang disyaratkan.⁴⁹

Riba hukumnya haram dalam semua agama Samawi. Kemudian Islam datang menguatkan hal itu. Allah SWT tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali terhadap pemakan riba. Barang siapa yang menganggap bahwa riba itu halal, maka ia kafir karena telah mengingkari sesuatu yang telah disebutkan oleh agama.⁵⁰

Hadirnya transaksi-transaksi yang serba canggih pada era modern ini, bahkan juga timbulnya konsep perbankan ala Barat yang berbasis bunga di negara-negara yang dikuasai Muslim, mengundang para cendekiawan-cendekiawan Muslim untuk beradu argumen mengenai bunga yang disajikan oleh bank-bank ala Barat. Menjadi titik tolaknya adalah apakah bunga itu riba atau bukan. Kaum neo-Revivalis berpedoman bahwa bunga adalah riba (diharamkan), karenanya mereka menuntut penghapusan bunga. Sedangkan kaum modernis berpendapat bahwa tidak semua bentuk bunga adalah riba. Mereka mengatakan hanya bunga yang dinilai tidak adil yang bisa dikatakan riba. Bahkan masalah riba-pun para ulama masih berbeda

⁴⁹Iqbal Zamir dan Mirakhor Abbas, *Pengantar Keuangan Islam* (Jakarta : Kencana. 2008), h. 81.

⁵⁰Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al. *Ensiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 madzhab edisi Keempat...*, h. 106.

pendapat, ada yang mengatakan riba haram kalau bersifat eksploitasi (yang berlebihan). Sedangkan yang lain mengatakan, semua riba haram baik itu sedikit atau banyak.⁵¹

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip Islam.⁵² Pada kenyataannya sebagian ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelanggaran riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain.⁵³

b. Macam-macam Riba

Pada dasarnya riba adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama uang tersebut dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu :

- a) Tambahan atas uang pokok;
- b) Tambahan yang sesuai dengan waktu;
- c) Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar menawar.⁵⁴

⁵¹Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". (Jurnal AL-ADALAH, Universitas Diponegoro Semarang, 3 Juni 2015), h. 648.

⁵²Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika. 2008), h.88.

⁵³Al-Mushlih, Abdullah dan Ash-Shawi, shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta : Darul Haq. 2004), h.345.

⁵⁴Nafik H.R Muhammad, *Benarkah Bunga Haram ?...*, h. 95-96.

Secara garis besarnya, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli.⁵⁵ Pada kelompok utang piutang, riba dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Riba *Qard*

Riba *Qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Misalnya seseorang yang berhutang seratus ribu rupiah diharuskan membayar kembali seratus sepuluh ribu rupiah, maka tambahan sepuluh ribu rupiah adalah riba *qardh*.⁵⁶ Larangan riba ini berdasarkan firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah. Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.⁵⁷

b) Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Biasanya apabila peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan, maka bunganya akan

⁵⁵*Ibid*, h. 99

⁵⁶Idri, *Ekonomi dalam perspektif hadist nabi...*, h. 192.

⁵⁷Subarkah Andi, et. al. *Al-Quran dan Terjemah...*, h. 408.

bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan.⁵⁸ Dasar larangan riba kategori ini antara lain firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.⁵⁹

Pada kelompok jual beli, riba dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Riba *fadhl*

Riba *fadhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan ukuran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis ribawi. Perkataan *fadhl* berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran atau penjualan barang yang sama jenis atau bentuknya. Riba dalam kategori ini dilarang berdasarkan hadis nabi yaitu :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ⁶⁰

Artinya : “Dari Abu Sa’id al-Khudzri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Jangan kalian jual beli emas dengan emas dan uang

⁵⁸Idri, *Ekonomi dalam perspektif hadist nabi...*, h. 181.

⁵⁹Subarkah Andi, et. al. *Al-Quran dan Terjemah...*, h. 66.

⁶⁰Idri, *Hadist Ekonomi:Ekonomi dalam perspektif hadist nabi...*, h. 188.

dengan uang kecuali dengan timbangan dan jenis yang sama.”
(HR. Muslim).

Riba yang timbul akibat pertukaran barang-barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran semisal ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Contoh berikut ini akan memperjelas adanya *gharar*.⁶¹

Ketika kaum Yahudi kalah perang *Khaibar*, harta mereka diambil sebagai rampasan perang, termasuk diantaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja perhiasan tersebut bukan gaya kaum *muslimin* yang sederhana. Oleh karena itu, orang Yahudi berusaha membeli perhiasan yang terbuat dari emas dan perak tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (*dinar*) dan uang yang terbuat dari perak (*dirham*). Jadi, sebenarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, tetapi pertukaran barang yang sejenis.⁶²

Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40 dirham dijual oleh kaum Muslimin kepada kaum Yahudi seharga dua atau tiga dirham, padahal nilai perhiasan perak seberat *uqiyah* jauh lebih

⁶¹A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 36.

⁶²Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), h. 41.

tinggi dari sekadar 2-3 dirham. Jadi, muncul ketidakjelasan (*gharar*) akan nilai perhiasan perak dan nilai uang perak (*dirham*). Dalam perbankan, riba *fadhhl* dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan tunai.⁶³

Ulama sepakat menetapkan riba *fadhhl* pada tujuh barang, seperti yang terdapat pada *nash*, yaitu emas, perak, gandum, garam dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan.⁶⁴

a) Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya, seorang yang menjual barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran kredit, jika sudah sampai jatuh tempo dan pembeli belum melunasi pembayaran, maka ia terkena penambahan harga sebagai kompensasi penguluran waktu. Demikian ini telah dipraktikkan pada zaman jahiliyah, yakni seseorang yang telah habis masa pembayaran hutangnya dan belum dapat membayarnya, maka ia wajib membayar beberapa kali lipat dan dengan diberikan beberapa waktu lagi.⁶⁵

Riba *Nasi'ah* disebut juga riba *duyun* yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul

⁶³ *Ibid*, h. 37.

⁶⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 264.

⁶⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al. *Ensiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 madzhab edisi Keempat...*, h. 110.

bersama risiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

Nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* lainnya. *Riba Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi, *al Ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmi* (risiko), hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhamam*); *al-ghunmu* dan *al-kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Padahal justru itulah yang terjadi didalam *riba nasi'ah*, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya bersifat tidak pasti menjadi pasti. Pertukaran kewajiban menanggung beban ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.⁶⁶

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya. *Riba Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang

⁶⁶A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* ..., h. 36.

yang diserahkan kemudian hari.⁶⁷ Larangan riba Nasi'ah didasarkan pada hadist nabi yaitu :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً
بِسَوَاءٍ⁶⁸

Artinya : “Dari Abu Sa’id al-Khudzri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Jangan kalian jual beli emas dengan emas dan uang dengan uang kecuali dengan timbangan dan jenis yang sama.” (HR. Muslim).

Dalam perbankan konvensional, riba *Nasi’ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan giro, dan lain-lain. Bank sebagai kreditor yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi.

Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan, sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis. Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.

c. Dasar Hukum Riba

a) Riba Dalam Al-Quran

Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunah. Al-Qur’an menyatakan haram

⁶⁷A. Karim Adiwarman, Sahroni Oni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2016), h. 4.

⁶⁸Idri, *Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam perspektif hadist nabi...*, h. 188.

terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Allah SWT telah mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu.⁶⁹

Larangan riba sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an telah didahului oleh bentuk-bentuk larangan lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi. Larangan ini tercermin dalam perilaku sosial ekonomi masyarakat Mekah pada saat itu. Dalam Al-Qur'an larangan Riba diturunkan melalui empat tahapan.

Pertama, penekanannya pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan secara Nasional. Akan tetapi, bunga akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁷⁰ Allah berfirman dalam surah ar-Rum ayat 39 yaitu :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَلَّيْكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah. Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*⁷¹

Kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang

⁶⁹Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama* (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri. 2013.), h.17.

⁷⁰*Ibid*, h. 18.

⁷¹Subarkah Andi, et. al. *Al-Quran dan Terjemah...*, h.408.

Yahudi yang memakan riba. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 160-161 :

فَظْلُمَ مَنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

Artinya : “Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah.” (160)

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِلُبٍّ طَلٍ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : “Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.” (161)⁷²

Ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa mengambil bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena dalam surah Ali-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁷³

⁷²Ibid, h. 103.

⁷³Ibid, h. 66.

Keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu beriman.”(278) “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”(279)⁷⁴

Riba dalam Al-Qur'an dilihat dari segi munasabah-nya menunjukkan beberapa karakter berikut. Pertama, riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti tidak dapat membedakan jual beli yang jelas halal dengan riba yang haram. Kedua, riba merupakan transaksi utang piutang dengan tambahan yang diperjanjikan di depan dengan dampak zhulm, ditandai dengan lipat ganda. Ketiga dalam sikap Al-Qur'an yang selalu menghadapi riba dengan sedekah, jual beli, zakat atau infak, maka diketahui bahwa riba mempunyai watak menjauhkan persaudaraan bahkan menuju permusuhan.

⁷⁴Ibid, h. 47.

Sebab, sedekah, jual beli, zakat atau infak merupakan lawan dari riba mempunyai watak mengakrabkan persaudaraan dan membuat iklim tolong menolong.⁷⁵

b) Riba Dalam Hadis

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ لَرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : “Dari Jabir ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan dan dua orang yang menyaksikan”. Ia berkata: “mereka berstatus hukum sama”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَنَسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ مُوبِقَاتٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu ‘anhu dari Nabi SAW bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya : “Wahai Rasulullah, apakah itu ? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan Riba, makan harta anak

⁷⁵Zuhri Muhammad, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 88.

yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina". (Bukhari)

d. Alasan diharamkannya riba⁷⁶

Hanabillah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba adalah jenis dan ukuran, yakni takaran bagi barang-barang yang ditakar dan timbangan bagi barang yang dapat ditimbang.

Syafi'iyah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba pada emas dan perak karena keduanya dari jenis nilai. Adapun pada empat barang selain pada emas dan perak, maka alasannya adalah karena ia adalah makanan, yaitu komoditi yang secara umum dimakan orang. Ini merupakan salah satu riwayat dikalangan Hanabillah.

Malikiyyah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba pada uang adalah masalah nilai, dan pada makanan adalah karena ia merupakan bahan pokok yang tersimpan, yakni menjadi kebutuhan pokok manusia dan dapat disimpan sampai waktu yang diinginkan.

Riwayat lain dikalangan Hanabillah menyatakan bahwa alasan diharamkannya selain pada emas dan perak adalah bahwa ia merupakan makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Maka tidak ada riba pada makanan yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat diitimbang.

Dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dapat ditakar dan ditimbang, sedangkan rasanya dari jenis yang sama, maka dapat

⁷⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al. *Ensiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 madzhab edisi Keempat...*, h. 111-114.

terjadi riba (jika tidak sama nilainya). Sesuatu yang tidak dapat ditakar, ditimbang, dirasakan, dan berbeda jenis, maka tidak ada riba padanya.

e. Pendapat Ulama Tentang Riba

a) Mazhab Hanifah

Riba *Fadhl* menurut Imam Hanafiyah adalah jual-beli barang yang ditukar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain, jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut diatas, seperti gandum dengan gandum yang ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, maka terjadilah riba *fadhl*.

Adapaun jual beli pada selain barang-barang yang ditimbang, seperti hewan, kayu, dan lain-lain tidak dikatakan riba meskipun ada tambahan dari salah satunya, seperti menjual satu kambing dengan dua kambing sebab tidak termasuk barang yang bisa ditimbang.

Diantara hikmah diharamkannya riba adalah untuk menghilangkan tipu menipu diantara manusia dan juga menghindari kemudharatan. Ukuran riba *fadhl* pada makanan adalah setengah *sha'*, sebab menurut golongan ini, itulah yang telah ditetapkan *syara'*. Oleh karena itu, dibolehkan tambahan jika kurang dari setengah *sha'*.

Riba *nasi'ah* adalah adanya salah satu dari dua sifat yang ada pada riba *fadh*l dan pembayaran diakhirkan. Riba seperti ini telah biasa dikerjakan oleh orang jahiliyah, seperti seseorang membeli dua kilogram beras pada bulan Januari dan akan dibayar dua setengah kilogram beras pada bulan Februari. Contoh riba *nasi'ah* yang berlaku secara umum pada zaman sekarang adalah bunga bank.

b) Mazhab Malikiyah

Diharamkannya riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba *nasi'ah* dan riba *fadh*l. Diharamkannya riba *nasi'ah* dalam makanan adalah sekedar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut.

Diharamkannya riba *fadh*l pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama. Alasan ulama Malikiyah menetapkan ini adalah di antara lain, apabila riba dipahami agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah dari makanan yang menjadi pokok kehidupan manusia, yakni makanan pokok, seperti gandum, padi, jagung, dan lainnya.

c) Mazhab Syafi'i

Riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. *Illat* pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga kriteria berikut :

- 1) Sesuatu yang biasa ditunjukan sebagai makanan atau makanan pokok;
- 2) Makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti yang ditetapkan dalam *nash* adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering;
- 3) Makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi'iyah antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan badan termasuk pula obat untuk menyehatkan badan.

Dengan demikian, riba dapat terjadi pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria diatas. Agar terhindar dari unsur riba menurut ulama syafi'iyah, jual beli harus memenuhi kriteria :

- 1) Dilakukan waktu akad, tidak mengaikan pembayarannya pada masa yang akan datang.
- 2) Sama ukurannya
- 3) Tumpang terima

Menurut ulama syafi'iyah, jika makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, dibolehkan adanya tambahan. Golongan ini mendasarkan pada hadis:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا
اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya :“(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima. Jika dia sejenis, juallah sekehendakmu asalkan tumpang terima.”

Selain itu, dipandang tidak riba walaupun ada tambahan jika asalnya tidak sama meskipun bentuknya sama, seperti menjual tepung gandum dengan tepung jagung.

d) Mazhab Hambali

Pada madzhab ini terdapat riwayat tentang riba, yang paling mashyur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Hanya saja, ulama Hambalilah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma. Riwayat kedua adalah sama dengan apa yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Dengan demikian juga pada sesuatu yang tidak dimakan manusia.

e) Mazhab Zhahiri

Menurut golongan ini, riba hanya bisa ditetapkan dengan *nash* saja, dengan demikian, riba hanya terjadi pada barang-barang yang telah ditetapkan pada hadist diatas, yaitu enam macam sebab golongan ini mengingkari *qiyas*.⁷⁷

f) Pandangan Abdul A'la al Maududi

Abdul A'la al Maududi menjelaskan bahwa intitusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Riba akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Secara sosial, institusi riba merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat apapun kecuali yang memberi keuntungan bagi diri sendiri. Cepat atau lambat masyarakat akan mengalami perpecahan.⁷⁸

g) Pandangan Imam ar- Razi

Beberapa alasan yang dikemukakan Imam ar-Razi untuk mendukung larangan terhadap bunga :

- 1). Merampas kekayaan orang lain. Dalam transaksi ini, satu rupiah ditukar dengan dua rupiah. Transaksi semacam ini mengakibatkan pinjaman berada dalam tekanan
- 2).Merusak moralitas para peminjam akan sangat tega merampas apa saja yang dimiliki si peminjam untuk mengembalikan

⁷⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h.264.

⁷⁸Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah ...*, h. 64.

bayaran bunga yang mungkin sudah berlipat dari pokok pinjaman. Dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya : *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan”*.

- 3). Melahirkan benih kebencian dan permusuhan. Bila perampasan harta si peminjam sudah dihalalkan, tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara si kaya dan si miskin. Hal ini disebabkan karena si kaya tidak mungkin akan membantu kecuali dengan harga yang mahal.
- 4). Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Si kaya akan memperoleh suku bunga yang sangat tinggi. Sementara itu, karena biaya modal menjadi sangat mahal, si miskin tidak mampu meminjam dan tidak bisa berusaha. Akibatnya si miskin akan tertinggal jauh dibelakang dari si kaya.⁷⁹

h) Mazhab fiqiyah

- 1) Badr Ad Din Al Ayni menyatakan bahwa prinsip utama dalam dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.
- 2) Imam Sarakhsi dari mazdhab Hanafi berpendapat bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa

⁷⁹Ibid, h. 65.

adanya *iwadh* yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut.

- 3) Raghīb Al Asfahani berpendapat riba adalah penambahan atas harta pokok.
- 4) Imam An Nawawi dari madzhab syafi'i menyatakan bahwa riba adalah penambahan atas pinjaman seiring bertambahnya waktu.
- 5) Qatadah berpendapat bahwa riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.
- 6) Mujahid. "Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar) si pembeli memberikan 'tambahan' atas tambahan waktu."
- 7) Zaid bin Aslam berpendapat yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang berimplikasi pelipat gandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya, pada saat jatuh tempo ia berkata " bayar sekarang atau tambah".
- 8) Ja'far Ash Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan riba, beliau menjawab: "Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan". Karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, maka seseorang tidak berbuat *ma'ruf* lagi atas transaksi pinjam meminjam dan sejenisnya.

Padahal riba *qard* bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia.

- 9) Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang riba beliau menjawab: “Sesungguhnya riba itu adalah seseorang yang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan”.⁸⁰

f. Praktik Riba di Zaman Sekarang

Di era globalisasi, kehidupan manusia terus berjalan menyesuaikan zaman dan kemajuan teknologi semakin pesat. Dalam kondisi ini mempengaruhi gaya kehidupan, seperti halnya dalam bermaksiat. Maka dari itu, kita sudah sepantasnya mengenali kondisi fenomena yang terjadi di kehidupan manusia modernisasi agar bisa mengambil hal yang positif dan menghindari hal-hal yang buruk serta tidak mudah terpengaruh oleh para penjahanya. Maka, perlu untuk menumbuhkan rasa waspada terhadap praktik riba yang ada di era globalisasi ini.⁸¹

Sebuah perwujudan riba nyatanya memiliki banyak varian. Dari mulai hadirnya produk perbankan yang berstatus konvensional maupun syari'ah, tetap saja mereka tidak bisa terlepas dari masalah

⁸⁰*Ibid*, h. 57.

⁸¹*Praktik Riba Merajalela di Kehidupan Masyarakat* <https://www.kompasiana.com>, 23 Mei 2013.

bunga. Walaupun pada dasarnya lembaga keuangan syari'ah menerapkan hukum-hukum islam didalamnya, ternyata belum mampu mengatasi permasalahan bunga. Sehingga ketika berbicara mengenai riba, akan selalu terhubung dengan bunga bank.⁸² Di antara praktik-praktik riba di masyarakat adalah di antaranya :

a) Pegadaian

Pegadaian ialah akad yang bersifat apa yang diberikan pegadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahim) yang tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahim adalah utang kepada rahin , bukan penukar atas barang yang diberikan.⁸³

Di antara bentuk riba yang merajalela di masyarakat ialah riba pegadaian. Sudah menjadi budaya diberbagai daerah dari pihak kreditur memanfaatkan barang gadai yang telah digadaikan kepadanya. Apabila gadai tersebut berupa ladang, maka kreditur mengelola ladang tersebut dan memanfaatkan hasilnya. Apabila gadai berupa kendaraan, maka kreditur berhak penuh atas kendaraan tersebut. Praktik semacam ini tidak diragukan lagi sebagai riba dikarenakan kreditur mendapatkan keuntungan dari utang piutang ini dengan cara memanfaatkan barang gadai.⁸⁴

⁸²Mustaqim Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta : LkiS Group. 2012), h.285.

⁸³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,...h.160.

⁸⁴Muhammad Badri Arifin, Praktik Riba Merajalela, <https://almanhaj.or.id/3236-praktik-riba-merajalela.html>, diakses pada Maret 2012.

b) Kartu Kredit

Kartu kredit adalah kartu yang dapat digunakan untuk penyelesaian transaksi ritel dengan sistem kredit. Dengan kartu ini, pengguna mendapatkan pinjaman uang yang dibayarkan kepada penjual barang atau jasa dari pihak penerbit kartu kredit. Sebagai konsekuensinya, penggunaan kartu kredit harus membayar tagihan dalam tempo waktu yang ditentukan dan apabila telat membayar, maka dia akan dikenai denda.

Tidak diragukan, bahwa praktik semacam ini adalah riba, karena penggunaan kartu kredit berarti berhutang, sehingga denda yang dibebankan atas setiap keterlambatan adalah riba.

c) Tukar Tambah Emas

Salah satu yang banyak ditemukan di masyarakat adalah tukar tambah emas. Emas lama ditukar dengan emas baru, tanpa ada esksekusi fisik terhadap uang hasil dari penjualan emas lama.

Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Itu berarti akan memusatkan harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya juga kecil. Maka daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.

3. Fatwa DSN-MUI Tentang Koperasi Dan Riba

a. Fatwa DSN-MUI Tentang Koperasi/Akad *Syirkah*⁸⁵

Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*

Mengingat:

a) Firman Allah SWT:

1) Q.S. Shad (38): 24:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

“... Sungguh banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...”

2) Q.S. Al-Maidah (5):1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman ! penuhi akad-akad itu...”

b) Hadist Nabi SAW:

Hadist Nabi riwayat *Abu Daud* dari *Abu Hurairah*:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka”.

c) *Taqrir* Nabi terhadap kegiatan *Musyarakah* yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.

d) *Ijma'* ulama atas bolehnya *Musyarakah*.

⁸⁵Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Menetapkan: Fatwa Akad *Syirkah*

Pertama: Ketentuan Umum

- a) Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *syirkah anwal* dan dikenal dengan nama *syirkah al-inan*.
- b) *Syarik* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad *syirkah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah*).
- c) *Ra's al-mal* adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang disatukan yang berasal dari para *syarik*.
- d) *Syirkah anwal* adalah *syirkah* yang *ra's al-mal*-nya berupa harta kekayaan dalam bentuk uang atau barang.
- e) *Syirkah abdan/syirkah a'mal* adalah *syirkah* yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.

Kedua: Ketentuan Hukum dan Bentuk Syirkah

Syirkah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk dibawah ini:

- a) *Syirkah Mu'qqatah*
- b) *Syirkah da'imah*
- c) *Musyarakah Mutanaqishah*
- d) *Syirkah anwal*
- e) *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal*
- f) *Syirkah wujuh*

Ketiga: Ketentuan *Shighat Akad*

- a) Akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (*syarik*).
- b) Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat: Ketentuan Para Pihak

- a) *Syarik* (mitra) boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah*) berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku
- b) *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

Kelima: Ketentuan *Ra's Al-Mal*

- a) Modal usaha *syirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
- b) Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta (*syirkah anwal*), keahlian, keterampilan (*syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*).
- c) Modal *syirkah anwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
- d) Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwin al-'urudh* pada saat akad.
- e) Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
- f) Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh *syarik*.
- g) Para *syarik* meyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib konveksi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
- h) *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam: Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

- a) Sistem metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b) Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.

- c) Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d) Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
- e) Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang).
- f) Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

Ketujuh: Ketentuan Kegiatan Usaha

- a) Usaha yang dilakukan *syarik (mitra)* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) *Syarik (mitra)* dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri.
- c) Para *Syarik (mitra)* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
- d) *Syarik (mitra)* dalam melakukan usaha *Syarik*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Kedelapan: Ketentuan Keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*Al-Khasarah*) Dan Pembagiannya

- a) Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- b) Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan diawal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.
- c) Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d) Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
- e) Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
- f) Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para *syarik* untuk menanggung risiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan.

Kesembilan: Ketentuan Aktivitas Dan Produk

a) Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/1V/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

b) Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan rekening koran syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musyarakah*.

c) Jika *syirkah* direalisasikan dalam bentuk *musyarakah mutanaqishah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.

d) Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sindikasi fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*).

Kesepuluh: Ketentuan Penutup

a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
- c) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa Dsn-Mui Tentang Riba

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dalam keputusan *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang bunga:

Pertama, Pengertian Bunga dan Riba:

- a) Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan /hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- b) Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

Kedua, Hukum Bunga (*interest*)

- a) Praktik pembungaan saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ya ini riba *Nasi'ah*. Dengan praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

b) Praktik penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.⁸⁶

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah suatu cara untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis atau suatu penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Masalah mengenai bagi hasil sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi anggota koperasi yang mendapatkan Sisa Hasil Usaha. Namun masih ada permasalahan disetiap transaksinya. Ada beberapa tulisan hasil rekan-rekan studi Muamalah Fakultas Syariah mengenai bagi hasil adalah sebagai berikut:

Pertama, Ardiyansyah Aristama, jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi Pada Gojek Shelter Kemiling, Bandar Lampung)". Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagi hasil tersebut.

Kedua, Anis Juliana Sari, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 berjudul "Tinjauan Hukum Sialam Tentang Sistem Bagi Hasil Atas Kerja Sama

⁸⁶Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004.

Supir Utama Dengan Supir Pengganti (Studi Pada Angkutan Kota di Terminal Raja Basa Bandar Lampung)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem bagi hasil atas kerja sama supir utama dengan supir pengganti dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagi hasil tersebut.

Ketiga, Oxsha Julian, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem peminjam uang bagi yang bukan anggota koperasi dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang larangan peminjaman uang bagi yang bukan anggota koperasi.

Dari tinjauan hasil penelitian terdahulu ternyata penelitian tentang bagi hasil ditinjau dari fiqh muamalah yang dilakukan koperasi belum ada yang spesifik mengkajinya sehingga hasil dari penelitian terdahulu belum terfokus pada pembagian dan penjelasan tentang sisa hasil usaha itu, untuk itu penelitian ini digarapkan mengisi kekosongan tersebut.

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari,
Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran

a) Sejarah Singkat Terbentuknya KPRI Mina Bahari

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dengan Badan Hukum Nomor 33/BH/KD.7.1/VII/2000, Akta Perubahan 1 Nomor: 12/PAD/BH/X.II/PPKPM/VII/2008, Akta Perubahan II Nomor: 03/Tanggal 08 Mei 2012, Akta Perubahan III Nomor: 108 Tanggal 29 September 2015, didirikan pada 1 Agustus tahun 2000. Bermula dari Pegawai Balai Besar Perikanan yang dalam musyawarah dianggap perlu untuk mendirikan atau membentuk suatu badan usaha bersama, maka badan usaha tersebut diberi nama KPRI Mina Bahari yang berada di Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

Koperasi Mina Bahari berdiri dibawah naungan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dan hanya peruntukan kepada pegawai yang bekerja di balai perikanan budidaya laut saja. Pada saat itu koperasi Mina Bahari belum beroperasi dengan baik bahkan belum diadakan Rapat Anggota Tahunan. Adanya Rapat Anggota Tahunan

setelah digantinya kepengurusan Koperasi Mina Bahari Pada tanggal 25 Maret 2008 sampai sekarang.⁸⁷

Koperasi Mina Bahari sendiri dibentuk untuk pegawai yang bekerja di Balai Besar Perikanan saja. Ketika pegawai tersebut telah habis masa jabatannya (pensiun) atau telah habis masa kontraknya maka anggota tersebut tidak diperbolehkan lagi menjadi anggota koperasi.⁸⁸ Bentuk kompensasi yang diberikan kepada anggota koperasi adalah dengan pembagian hasil usaha dalam bentuk uang maupun barang dengan otomatis masuk ke dalam simpanan sukarela. Kompensasi tersebut merupakan bonus yang diberikan koperasi kepada anggotanya secara cuma-cuma, koperasi Mina Bahari juga menyediakan santunan (termasuk santunan kematian) dan biaya sosial bagi anggota yang dikira memerlukan santunan tersebut.⁸⁹

b) Visi dan Misi Koperasi Mina Bahari

Adapun Visi KPRI Mina Bahari dalam melaksanakan operasionalnya adalah :

“Menciptakan kebersamaan dan transparansi untuk mencapai koperasi yang bermanfaat bagi anggotanya”.

⁸⁷Wawancara dengan Yuwana Puja, Ketua Pengurus Koperasi pada tanggal 23 April 2019 di kantor koperasi Mina Bahari.

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Wawancara dengan Juliansari Dewi, Bendahara Pengurus Koperasi pada tanggal 23 April 2019 di kantor koperasi Mina Bahari.

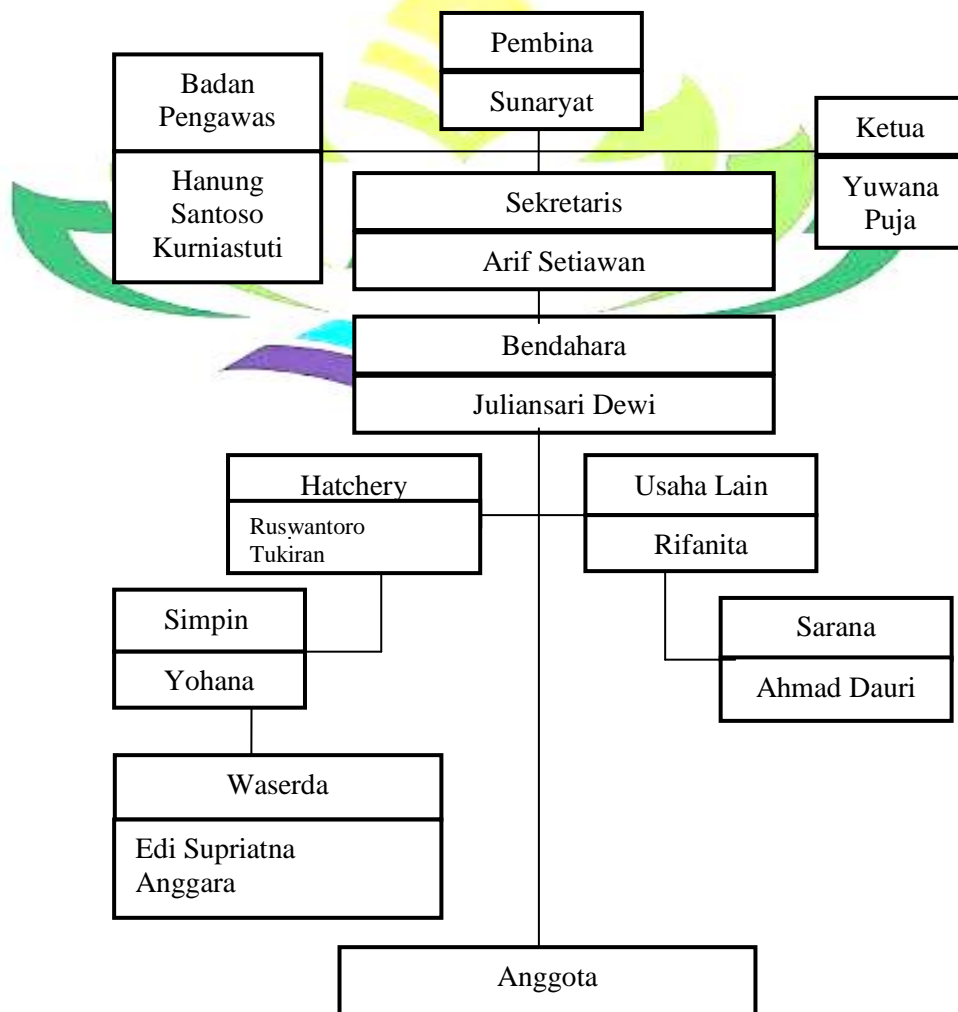
Adapun Misi KPRI Mina Bahari adalah : “Mencapai kesejahteraan bersama dalam kekeluargaan yang disepakati dengan musyawarah”.⁹⁰

c) Struktur Organisasi Koperasi Mina Bahari

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu bagian atau pola hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasikan tugas suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Tabel 1. Bagan Struktur Organisasi KPRI Mina Bahari Masa Bakti 2018-2020



⁹⁰Profil KPRI Mina Bahari.

Struktur organisasi juga mencerminkan tugas, tanggung jawab dan wewenang pada bidangnya masing-masing yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan merupakan alat perlengkapan organisasi yang memiliki kekuatan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota tahunan ini diselenggarakan minimal satu tahun sekali sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada anggota koperasi.

2) Pengurus

Pengurus adalah perwakilan dari anggota yang bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya. Pengurus bertugas untuk:

- a) Mengelola koperasi dan usahanya;
- b) Menyelenggarakan rapat anggota;
- c) Memelihara buku daftar anggota dan pengurus;
- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

Pengurus berwenang untuk :

- a) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

b) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Dalam hal ini pengurus Koperasi Mina Bahari (lihat halaman 59).

3) Badan Pengawas

Diperlukan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang mengelola koperasi upaya dapat berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini, badan pengawas dari koperasi Mina Bahari (lihat halaman 59).

b. Bidang Usaha Koperasi

1) Unit Usaha Simpan Pinjam (Simpin)

Simpan Pinjam adalah kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya.⁹¹ Dalam kegiatan kredit pada anggota yang membutuhkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pemberian kredit maksimal Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta rupiah), disesuaikan dengan jenis kebutuhan anggota, dana yang tersedia dan sisa gaji/honor yang diterima anggota;
- b) Masa pengembalian kredit maksimal 24 bulan dan 12 bulan bagi tenaga non PNS;
- c) Setiap peminjam dikenakan jasa 1.0% per bulan;

⁹¹Hendrojogi, *Koperasi Azaz-Azaz, Teori dan Praktik...*, h.200.

- d) Peminjam langsung dikenakan pemotongan gaji;
- e) Setiap peminjam langsung dikenakan potongan sebesar 1.0% dari besar pinjaman pada saat pencairan untuk Simpanan Wajib Khusus;
- f) Peminjam mengisi formulir permohonan yang diketahui oleh ketua koperasi
- g) Membuat laporan bulanan.

2) Kegiatan Waserda

- a) Mencukupi kebutuhan pokok karyawan sesuai kemampuan koperasi Mina bahari ;
- b) Mengusahakan penekanan harga lebih murah atau minimal sama dengan harga pasaran;
- c) Pemberian bon waserda maksimal 1.000.000, apabila dalam 3 bulan berturut-turut belum dilunasi maka dilakukan pemotongan gaji/honor disesuaikan dengan sisa gaji/honor;
- d) Membuat laporan bulanan.

3) Unit Usaha Hatchery

- a) Diversifikasi jenis benih yang diproduksi, sehingga menambah pendapatan;
- b) Mendatangkan telur dari tempat lain, atau penggelondongan kerapu hibrid;
- c) Meningkatkan kualitas benih hasil produksi
- d) Membuat laporan bulanan dengan rinci.

4) Unit Usaha Sarana Prasarana Budidaya Ikan :

- a) Menyediakan pakan buatan pembenihan dan pembesaran ikan laut;
- b) Menyediakan sarana /peralatan kerja budidaya laut.

5) Unit Usaha-Usaha Lain :

- a) Membantu mencukupi kebutuhan anggota yang belum tersedia di waserda dan belum terakomodir di unit kegiatan simpan pinjam baik berupa barang atau uang;
- b) Mengusahakan kebutuhan perabotan rumah tangga anggota dan kebutuhan kegiatan pelatihan, magang, PKL yang dilakukan oleh Balai Budidaya Perikanan;
- c) Mencukupi kebutuhan lainnya untuk instansi pemerintah maupun swasta;
- d) Jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 24 bulan;
- e) Setiap peminjam dikenakan jasa 1.0% perbulan;
- f) Pemohon mengisi formulir yang diketahui oleh ketua;
- g) Membuat laporan.

6) Simpanan Anggota

- a) Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu, simpanan wajib anggota pada koperasi Mina Bahari sebesar Rp. 100.000/bulan untuk semua anggota;

- b) Simpanan Pokok adalah fungsi dari koperasi untuk unit usaha simpan pinjam, simpanan pokok dan Wajib akan dipotong gaji/honor;
- c) Memotifasi anggota untuk melakukan simpanan sukarela.

7) Dana Simpanan

- a) Periode penyimpanan Januari sampai Desember (SHU dapat diperhitungkan tahun berjalan);
- b) Bagi anggota yang menyimpan uang di Koperasi Mina Bahari akan diberikan jasa mengikuti SHU yang diterima pada tahun berjalan;
- c) Batas minimal penyimpanan (Rp. 500.000,-);
- d) Pengambilan dana simpanan dapat dilakukan dengan konfirmasi 1 bulan sebelumnya, apabila pengambilan uang simpanan sebelum 31 desember tahun berjalan, maka SHU tidak diperhitungkan ;
- e) Perhitungan SHU didasarkan pada persentase pada SHU simpanan.

8) Bidang Pendidikan

Mengusahakan peningkatan pengetahuan anggota, pengurus, dan badan pengawas secara bertahap dengan cara mengikutsertakan latihan/kursus kilat yang dilaksanakan oleh kantor koperasi dan penanaman modal serta konsultasi dengan pembina koperasi Pesawaran dan lain-lain.

9) Bidang Sosial

Dalam hal ini, kegiatan bidang sosial koperasi mina bahari meliputi :

- a) Memberikan bantuan dana sosial kepada anggota yang sakit dengan ketentuan anggota tersebut dirawat di rumah sakit sebesar Rp. 500.000,-. Bantuan tersebut hanya diberikan satu kali dalam tahun buku tersebut;
- b) Memberikan bantuan melahirkan bagi anggota atau istri anggota sebesar Rp. 300.000,- bantuan dibatasi sampai dua kali melahirkan;
- c) Memberikan sumbangan kepada keluarga (anak, istri atau suami) yang meninggal sebesar Rp. 500.000,-;
- d) Anggota yang meninggal diberikan sumbangan sebesar Rp. 1.000.000,-
- e) Kepada pegawai yang pindah/mutasi diberikan tali asih yang besarnya disesuaikan lamanya menjadi anggota koperasi dengan perhitungan $\text{Rp. 1.000.000} \times \text{lamanya menjadi anggota koperasi}$;
- f) Semua ketentuan diatas berlaku apabila dana sosial di koperasi Mina Bahari masih tersedia.

B. Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mina Bahari

Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan

perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.⁹²

Setelah laporan keuangan koperasi Mina Bahari dari laporan seluruh unit usaha, selanjutnya pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha diputuskan oleh para anggotanya melalui Rapat Anggota Tahunan. Adapun perincian persentase perhitungan Sisa Hasil Usaha koperasi Mina Bahari adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Perincian persentase perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Mina Bahari

No.	URAIAN	%
1.	Dana Cadangan Koperasi	10%
2.	Untuk Anggota Menurut Perbandingan Simpanannya	30%
3.	Untuk Anggota Menurut Transaksi Waserda	10%
4.	Untuk Anggota Menurut Jasa Simpanannya	20%
5.	Untuk Dana Pengurus	10%
6.	Untuk Dana Pendidikan Koperasi	10%
7.	Untuk Dana Sosial	10%

*Sumber data: laporan perhitungan SHU Tahun buku 2018.

Jadi, laporan keuangan koperasi Mina Bahari akan dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan laporan keuangan unit usaha lainnya yang ada dikoperasi Mina Bahari. Dari itulah keuntungan seluruh unit usaha koperasi Mina Bahari yang disatukan menjadi SHU untuk diputuskan dibagi atau tidaknya oleh para anggota Koperasi Mina Bahari melalui Rapat Anggota Tahunan.

⁹²Pasal 45 ayat (2) UU no 25 tahun 1992

Rincian beban operasional KPRI Mina Bahari per 31 Desember 2018:

1. Penjualan Barang dan Jasa

a. Penjualan barang waserda	693.283.888,00
b. Jasa simpan pinjam	325.380.000,00
c. Penjualan barang usaha lain-lain	828.735.000,00
d. Penjualan benih hatchery kerapu	166.050.000,00
	<hr/>
	2.013.448.888,00

2. Biaya Organisasi

a. Biaya RAT	10.000.000,00
b. Honor pengurus	18.000.000,00
c. Rapat pengurus	3.000.000,00
d. Administrasi	15.000.000,00
e. Transportasi	84.000,00
	<hr/>
	46.084.000,00

3. Biaya Beban Usaha

a. Upah/THR karyawan Waserda	23.935.500,00
b. Adm usaha dan lain-lain	11.875.000,00
	<hr/>
	35.810.500,00

4. Biaya administrasi dan umum

a. Pembuatan kalender	1.500.000,00
b. Voucher belanja waserda (Idul Fitri)	59.650.220,00
c. Kaos anggota Miba	14.000.000,00
d. Pajak tahun 2018	20.000.000,00
	<hr/>
	95.150.220,00

Perhitungan Sisa Hasil Usaha KPRI Mina Bahari per 31 Desember

2018:

1. Penjualan Barang dan Jasa

a. Penjualan barang waserda	693.283.888,00
b. Jasa simpan pinjam	325.380.000,00
c. Penjualan barang usaha lain-lain	828.735.000,00
d. Penjualan benih hatchery kerapu	166.050.000,00
	<hr/>
	2.013.448.888,00

2. Harga Pokok Penjualan

a. Harga pokok penjualan barang waserda	601.886.338,00
b. Harga pokok penjualan barang usaha lain	261.000.000,00
c. Penjualan benih hatchery kerapu	60.699.800,00
	<hr/>
	1.595.201.138,00

3. Pendapatan Hasil Usaha Kotor (1-2) **418.247.750,00**

a. Beban jasa pelunasan	
b. Beban jasa pelunasan simpan pinjam	30.018.033,00
c. Beban jasa pelunasan usaha lain	3.899.531,00
	<hr/>
	33.917.564,00

4. Pendapatan hasil usaha (3-4) **384.330.186,00**

5. Pendapatan dari jasa usaha lainnya **1.452.000,00**

6. Total Pendapatan Usaha (5+6) **385.782.186,00**

7. Beban operasional

a. Biaya organisasi	46.084.000,00
---------------------	---------------

b. Biaya beban usaha	35.810.500,00
c. Biaya administrasi dan umum	95.150.220,00
	+
Jumlah beban operasional	177.044.720,00

Adapun perhitungan SHU berdasarkan transaksi, pinjaman dan simpanan sebagai berikut :

Tabel 5. Perhitungan SHU berdasarkan transaksi, Jasa pinjam dan simpanan

No	Nama	WASERDA (10%)	Jasa Pinjaman (20%)	Simpanan (30%)	Total SHU
1.	Harno	951.000,00 (10%) = 95.100,00	-	11.675.747 (30%) = 3.502.724,10	3.597.824,10
2.	Kurnia	2.376.950 (10%) = 237.695,00	525.000,00 (20%)= 105.000,00	13.716.093,00 (30%) = 4.114.827,90	4.457.522,90
3.	Suci	3.424.000,00 (10%) =342.400,00	-	15.339.921,80 (30%) = 4.601.976,30	4.944.376,30
4.	Hidayat	200.000,00 (10%) = 20.000,00	-	11.808.687,47 (30%) = 3.542.606,00	3.562.606,00
5.	Agoes	4.256.000,00 (10%) = 425.600,00	-	13.123.853,59 (30%) = 3.937.155,90	4.362.755,90
6.	Yuwana	4.410.300,00 (10%) = 441.300,00	-	33.343.395,38 (30%) = 10.003.180,50	10.444.480,50
7.	Supriya	2.497.100,00 (10%) = 249.710,00	-	14.127.859,10 (30%) = 4.238.357,70	4.488.067,10
8.	Julian	1.563.000,00 (10%) = 156.300,00	660.000,00 (20%)= 132.000,00	31.128.808,44 (30%) = 9.338.642,40	9.626.942,40
9.	Slifister	5.382.300,00 (10%) = 538.230,00	20.000.000,00 (20%) = 4.000.000,00	15.013.580,77 (30%) = 4.504.074,00	9.042.304,00
10.	Hanung	2.330.300,00 (10%) = 233.030,00	-	19.947.438,08 (30%) = 5.984.231,40	6.217.261,40

*Sumber Data: Perhitungan SHU Tahun Buku Berdasarkan Transaksi, Jasa Pinjam dan Simpanan

Dari tabel diatas menegaskan bahwa, besarnya Sisa Hasil Usaha yang didapat dari masing-masing anggota tidak sama dan tidak dihitung hanya dari besarnya simpanan anggota, melainkan dihitung dari jumlah jasa pada transaksi yang dilakukan anggota juga.



BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah data terkumpul kemudian diadakan pengolahan data maka langkah selanjutnya menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

A. Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mina Bahari.

Koperasi Mina Bahari memiliki unit usaha antara lain, unit usaha waserda, unit usaha simpan pinjam, unit usaha hatchery, dan unit usaha lain dengan mencukupi kebutuhan anggota yang belum tersedia di unit usaha waserda dan belum terakomodir di unit usaha simpan pinjam baik berupa barang atau uang.

Hasil wawancara dengan ketua koperasi Mina Bahari bapak Yuwana Puja pada tanggal 23 April 2019, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, yang menjelaskan bagaimana praktik pembagian Sisa Hasil Usaha pada koperasi Mina Bahari yaitu, untuk dana cadangan 10%, untuk anggota menurut perbandingan transaksi simpanan 30%, untuk anggota menurut transaksi waserda 10%, untuk anggota menurut jasa simpanannya 20%, untuk dana pengurus 10%, untuk dana sosial 10%, dan untuk dana pendidikan koperasi 10%.

Pada koperasi Mina Bahari Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran persentase transaksi semua anggota tidaklah sama. Anggota

koperasi Mina bahari terbagi menjadi dua jenis. Yaitu, anggota yang banyak bertransaksi pada unit usaha waserda, unit usaha simpan pinjam, unit usaha hatchery, dan unit usaha lain, anggota tersebut di katakakan anggota aktif. Begitu sebaliknya, anggota yang hanya bertransaksi pada unit usaha waserda, unit usaha Hatchery dan unit usaha lain tanpa bertransaksi pada unit usaha simpan pinjam, maka anggota tersebut dapat dikatakan anggota pasif. Namun aktif dan pasif nya anggota tidak menjadi halangan anggota untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mina Bahari.

Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh dalam bidang aqidah, akhlak dan muamalah. Ajaran Islam merupakan satu sistem yang komprehensif dan umat Islam harus merealisasikan ajaran Islam itu dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dibidang ekonomi.

Bentuk bermuamalah yang terjadi pada pembagian Sisa Hasil Usaha pada koperasi Mina Bahari Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran didalam teorinya disebut *Musyarakah*, yang mana akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Adapun pengertian akad *Musyarakah* menurut para ulama adalah sebagai berikut :

1. *Syirkah* yaitu suatu kesepakatan antara orang yang berserikat mengenai modal dan keuntungan. (Ulama Hanafiyah)
2. *Syirkah* menurut syara' yaitu suatu perjanjian terhadap tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. (Ulama Syafi'iyah)
3. *Syirkah* adalah orang yang berserikat untuk mengelola harta dari keduanya sesuai dengan kesepakatan keduanya. (Ulama Malikiyah)
4. *Syirkah* yaitu, perkumpulan yang bersifat kerja sama bersama-sama atas kepemilikan hak dan pemakaian harta. (Ulama Hanabilah)

Adapun rukun dan syarat akad *Musyarakah*, antara lain:

1. Rukun iakad i*Musyarakah*⁹³:
 - a. Ijab-kabul (*sighah*) yaitu kerja sama antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
 - b. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan mengelola harta.
 - c. Objek akad yang disebut juga *ma'qud ialaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
 - d. Nisbah bagi hasil

⁹³Hidayat Anang, *Transaksi Ekonomi Syariah...* , h. 149.

2. Syarat Musyarakah⁹⁴

a. Sesuatu yang berkaitan dengan bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:

- 1) Yang berkaitan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
- 2) Yang berkaitan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang yang *bersyirkah*.

b. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirka mal* (harta) dalam hal ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi.

- 1) Bahwa modal yang dijadikan obyek akad *syirkah* adalah idari alat pembayaran.
- 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan.

Praktik pembagian Sisa Hasil usaha pada koperasi Mina Bahari adalah suatu kerjasama sama *Syirkah Al-Inan*, dimana terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana kesepakatan antara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun bagi hasil, tidak harus sama dan tetap sesuai dengan kesepakatan mereka.

⁹⁴*Ibid.*

Az-Zuhri menyatakan bahwa *syirkah 'inan* adalah jika masing masing dari dua orang yang berserikat mengeluarkan beberapa dinar atau dirham kemudian menggabungkannya. Adapun *syirkah 'inan* secara terminologis terdapat perbedaan dedefinisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab fiqh. Akan tetapi, definisi yang relevan dan representatif adalah “transaksi yang berisikan pekerja usaha yang masing-masing pengusaha tersebut memiliki saham dengan memberikan sejumlah kebebasan untuk berdagang dengan tujuan mendapatkan bagian dari keuntungannya.

Persentase transaksi semua anggota tidaklah sama. Anggota koperasi Mina bahari terbagi menjadi dua jenis. Yaitu, anggota yang banyak bertransaksi pada unit usaha waserda, unit usaha simpan pinjam, unit usaha hatchery, dan unit usaha lain, anggota tersebut dikatakan anggota aktif. Begitu sebaliknya, anggota yang hanya bertransaksi pada unit usaha waserda, unit usaha Hatchery dan unit usaha lain tanpa bertransaksi pada unit usaha simpan pinjam, maka anggota tersebut dapat dikatakan anggota pasif. Namun aktif dan pasifnya anggota tidak menjadi halangan anggota untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Berdasarkan penelitian, penulis menganalisa bahwa Pembagian sisa hasil usaha pada koperasi Mina Bahari berdasarkan masing-masing unit usaha adalah sebagai berikut:

Pertama, pembagian sisa hasil usaha yang diambil dari unit usaha waserda dimana setiap anggota mendapatkan 10% dihitung dari persentase belanja anggota selama satu tahun buku disebut *hibah*. Hibah disebut juga hadiah atau pemberian. Dalam istilah *syara'*, *hibah* berarti memberikan sesuatu pada orang lain selagi masih hidup. *Hibah* disyariatkan dan dihukumi sunah dalam Islam berdasarkan Al-Quran, sunah dan *ijma'* sebagaimana dalam firman Allah:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya :“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. al-Maidah : 2)⁹⁵

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ...

Artinya: “Dan infakkanlah dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu.”(Q.S. Al-Munafiqun: 10).

Ayat diatas dapat dipahami adanya anjuran kepada sesama manusia untuk saling membantu yang salah satu bentuknya adalah dengan cara memberi *hibah*.

⁹⁵Andi Subarkah, et. al. *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung : Syamil Quran, 2012), h. 106.

Kedua, pembagian sisa hasil usaha koperasi Mina Bahari pada unit usaha simpanan dengan perhitungan sisa hasil usahanya yang diambil 30% berdasarkan transaksi anggota selama satu tahun buku. Dalam muamalah disebut akad *syirkah*. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dimana dalam penyertaan modal tidak diharuskan sama dan dengan pembagian keuntungan, pekerjaan dibagi sesuai modal dan kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian yang telah disepakati diawal. Allah berfirman dalam Q.S. Sad: 24:

وَأَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "Dan banyak orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan".

Ketiga, pembagian sisa hasil usaha koperasi Mina Bahari pada unit usaha pinjaman dengan perhitungan sisa hasil usahanya yang diambil 20% berdasarkan transaksi anggota selama satu tahun buku. Dimana pada pembayaran dari unit usaha pinjaman, setiap anggota dikenai jasa sebesar 1% disetiap pembayarannya. Dengan hal ini Allah berfirman dalam Q.S. Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.* (Q.S. Ali-Imran: 130).

Pembagian sisa hasil usaha pada unit usaha pinjaman yang kenai jasa 1% pada setiap pembayarannya apabila dilihat dari utang yang ada tambahan disetiap pembayarannya dan bersifat memberatkan maka dianggap riba. Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat Akan tetapi, hasil dari wawancara penulis kepada anggota-anggota koperasi bahwa mereka tidak merasa diberatkan dan bahkan meraasa ditolong dengan adanya unit usaha tersebut yang pada akhirnya jasa 1% yang mereka bayar kembali kepada anggota pada saat pembagian sisa hasil usaha.

Berdasarkan penelitian, penulis menganalisa bahwa koperasi Mina Bahari pada pembagian sisa hasil usahanya secara konvensional telah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Dimana komponen perhitungan sisa hasil usahanya antara lain, pendapatan operasional utama, pendapatan operasional lainnya, sisa hasil usaha kotor, beban operasional, dan beban pajak.

Kemudian, ditinjau dari segi akad, praktik pembagian sisa hasil usaha pada Koperasi Mina Bahari, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *musyarakah*. Hal ini dapat dilihat dari praktik pembagian sisa hasil usaha pada koperasi Mina Bahari dalam jasa pinjaman dikenakan sebesar 1% di. Pembagian Sisa

Hasil Usaha (SHU) pada koperasi Mina Bahari berdasarkan praktik bagi hasil telah sesuai dengan akad *syirkah al-inan*, dikarenakan dari penanaman modal, pekerjaan, keuntungan, kerugian dan persentase dari transaksi masing-masing anggota pada penjualan produk koperasi tidak sama. Akan tetapi, pada penjualan produk usaha lain yaitu produk simpan (Simpan pinjam) pada koperasi Mina Bahari masih menggunakan jasa pinjaman 1% pada setiap pembayarannya, mengenai hal ini adanya perbedaan pendapat para ulama ada yang mengatakan bunga adalah riba namun ada juga yang mengatakan itu bukan riba. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada anggota-anggota koperasi yang menggunakan jasa pinjam, anggota tidak merasa diberatkan dengan adanya jasa pinjam 1% bahkan anggota merasa tertolong. Dalam hal ini penulis memilih jasa pinjam 1% bukan termasuk bunga dikarenakan jasa tersebut sudah disepakati semua anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran antara lain:

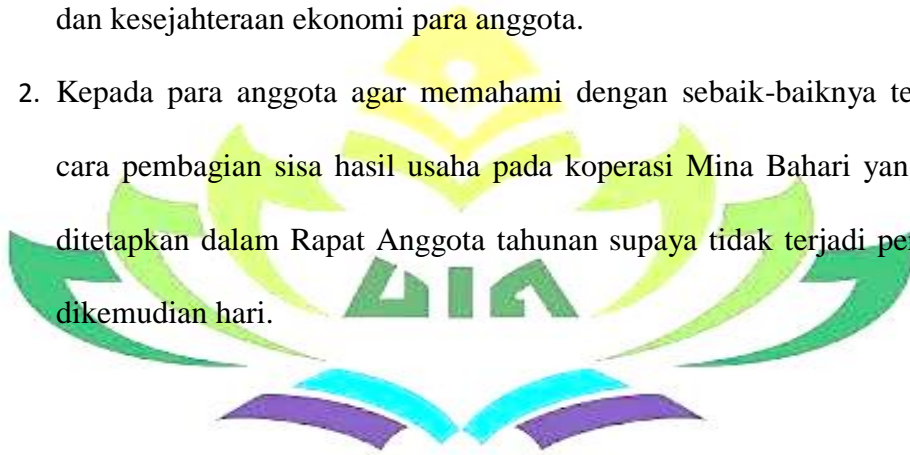
A. Kesimpulan

1. Pembagian sisa hasil usaha pada koperasi Mina bahwa besarnya keuntungan yang didapat oleh masing-masing anggota tidak sama dan tidak dihitung hanya dari besarnya simpanan anggota, melainkan dihitung dari jumlah jasa pada transaksi atau modal masing-masing yang dilakukan anggota.
2. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi Mina Bahari berdasarkan praktik bagi hasil telah sesuai dengan akad *syirkah al-inan*, dikarenakan dari penanaman modal, pekerjaan, keuntungan, kerugian dan persentase dari transaksi masing-masing anggota pada penjualan produk koperasi tidak sama. Akan tetapi, pada penjualan produk usaha lain yaitu produk simpin (Simpan pinjam) pada koperasi Mina Bahari masih menggunakan jasa pinjaman 1% pada setiap pembayarannya, mengenai hal ini adanya perbedaan pendapat para ulama ada yang mengatakan bunga adalah riba namun ada juga yang mengatakan itu bukan riba. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada anggota-anggota koperasi yang menggunakan jasa pinjam, anggota tidak merasa diberatkan dengan adanya jasa pinjam 1% bahkan anggota merasa tertolong. Dalam hal ini penulis memilih jasa pinjam 1% bukan termasuk bunga dikarenakan jasa

tersebut sudah disepakati semua anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

B. Saran

1. Bagi pengurus koperasi Mina Bahari lebih mempertegas fungsi, tujuan dan benar-benar menjalankan tugas dengan amanah, supaya kedepannya unit-unit usaha dari koperasi Mina Bahari lebih menjamin mutu, kualitas dan kesejahteraan ekonomi para anggota.
2. Kepada para anggota agar memahami dengan sebaik-baiknya terhadap cara pembagian sisa hasil usaha pada koperasi Mina Bahari yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota tahunan supaya tidak terjadi persoalan dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al. *Ensiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 madzhab edisi Keempat* Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif. 2017.
- Ahmad Dimiyati, *Islam dan Koperasi*, Jakarta: KOPINFO, 1998.
- Ahman Eeng dan Indriani Epi, *Membina Kompetensi Ekonomi*, Bandung : Grafindo Media Pratama. 2007.
- A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- A Karim Adiwarmanto, Sahroni Oni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Ash-Shawi, shalah, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq. 2004.
- Ali Hasan M, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.
- Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Andi Subarkah, et. al, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung : Syamil Quran, 2012.
- Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Pers, 2001.
- Anoraga Panjhi dan Widiyanti Ninik, *Management Koperasi Teori dan Praktik*, Semarang : Pustaka Jaya. 1994.
- Anoraga Pandji, *Dinamika Koperasi*, Jakarta : PT Rineka Cipta 2007.
- Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori dan Praktik* Jakarta : Penerbit Erlangga, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Deliarnov, *Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, 2007.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Muhammad Badri Arifin, *Praktik Riba Merajalela*, <https://almanhaj.or.id/3236-praktik-riba-merajalela.html>, diakses pada Maret 2012.

Efa Rodiah Nur, “*Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*”. (Jurnal Al-Adalah, Universitas Dipenegoro Semarang, 3 Juni 2015.

Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004.

Firdaus Muhammad, Edi Susanto Agus, *Perkoperasian : Sejarah, Teeori dan Prakrik*, Bogor : Ghlia Indonesia, 2004.

Fuad Muhammad Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung : PT Alma’arif, 1985.

Harahap Syabirin, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Harahap Isnaini, et. al. *Hadis-Hadis Ekonomi Edisi Pertama* Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.

Hasbie Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Hendrojogi, *Koperasi Azaz-Azaz, Teori dan Praktik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Idri, *Hadist Ekonomi:Ekonomi dalam perspektif hadist nabi*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.

Iqbal Zamir dan Mirakhor Abbas, *Pengantar Keuangan Islam*, Jakarta : Kencana, 2008.

Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri. 2013.

Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Pradigma, 2005.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2002.

Mustaqim Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta : LkiS Group, 2012.

Nafik H.R Muhammad, *Benarkah Bunga Haram ?*, Surabaya : Amanah Pustaka, 2009.

Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metedologi penelitian Cetakan Ke-4* Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Pasal 45 ayat (2) UU no 25 tahun 1992.

Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor .25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Praktik Riba Merajalela di Kehidupan Masyarakat <https://www.kompasiana.com>, 23 Mei 2013.

Profil KPRI Mina Bahari.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001, h.160.

Razak A, Latief Rais, *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.

Refrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta : BPFE. 2000.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah* Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Taringan Akmal, *Dasar-Dasar Koperasi*, Bandung : Cita Pustaka Media, 2006.

Timotius Kris H, *Pengantar metodologi penelitian* Yogyakarta: ANDI, 2017.

Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank Dalam Islam*, Jurnal Al-Adl Vol.7 No.2 Juli 2014.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Wawancara dengan Yuwana Puja, Ketua Pengurus Koperasi pada tanggal 23 April 2019 di kantor koperasi Mina Bahari.

Wawancara dengan Juliansari Dewi, Bendahara Pengurus Koperasi pada tanggal 23 April 2019 di kantor koperasi Mina Bahari.

Widiyanti Ninik, Y.W, Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Cet.4*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : Grafik Grafika, cet ke-3, 2011.

Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : CV.Haji Masagung, 1988.

Zuhri Muhammad, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.

